

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah kemiskinan muncul ketika seorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit Kemiskinan (porper) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. dalam arti luas, Chambers (dalam Criswardani surya wati, 2015), mengatakan bahwa kemiskinan merupakan adalah suatu konsep terpadu (integrated concept) yang memiliki 5 dimensi yaitu: kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan, keterasingan. Kemiskinan juga bisa diartikan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang mana masalah utama yang ingin dituntaskan oleh berbagai Negara di seluruh dunia. Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang memiliki fokus untuk menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Berdasarkan Undang - Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Menurut peraturan presiden Nomor 116 Tahun 2004 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam isi peraturan disebutkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membuat program perlindungan sosial, yaitu : Program Simpan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah – tengah masyarakat, khususnya di negara – negara berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena hingga kini belum bisa dientaskan bahkan kini semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Menurut pendapat (Syahwier;2016) fenomena kemiskinan masih menjadi problem pokok terutama di daerah – daerah. Pembangunan ekonomi yang tidak merata mengaburkan realita kemiskinan yang membuat indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan yang meningkat di daerahnya

masing – masing. Penyerapan pemerintah kabupaten/ kota mengenai kemiskinan akan menunjukkan integrasi kenegarawan yang kuat. Namun, masalah kemiskinan bukan sekedar menghitung angka – angka, menyatakan kemiskinan dengan menghitung kenaikan laju pertumbuhan ekonomi atau mengeluarkan dana bantuan sosial atau hibah yang sebesar – besarnya.

Dalam mengatur kemiskinan suatu wilayah dapat dilakukan dengan melihat dua indikator yang berkorelasi yakni persentase penduduk miskin dan pengeluaran perkapita makanan. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki – laki ataupun perempuan tidak terpenuhi hak – hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Para ekonom dan ahli sosial sibuk mencari – cari gejala penyakit yang bernama ketimpangan pendapatan yang diduga jadi sebab utama timbulnya kemiskinan.

Kemiskinan pembangunan nasional di kehidupan masyarakat masih belum teratasi dengan baik. Pembangunan yang menjadi masalah kemiskinan akan teratasi sendirinya melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh pada ketimpangan pendapatan bagi masyarakat. Sehingga masuk dalam kategori komponen masyarakat yang mampu menabung adalah kelompok orang kaya, bukan dari kelompok orang miskin. Sehingga pertumbuhan ekonomi hanya dapat dikategorikan oleh kelompok masyarakat yang mampu memupuk modal (Todaro 2000 : 53)

Faktor pertama yang mempengaruhi persentase kemiskinan adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang

memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun apabila kualitas rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Mereka tidak mempunyai lahan atau alat produksi sendiri biasanya merupakan korban pertama dari langkah langkah penghematan anggaran pemerintah. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengikat/mengunci. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1

Statistik Kemiskinan Kota Medan

Tahun 2012- 2018

Tahun	Penduduk Miskin
	Jumlah (000)
2012	201,06
2013	209,69
2014	200,32
2015	207,50
2016	206,87
2017	204
2018	186

Sumber : <https://medankota.bps.go.id>

Semakin tinggi jumlah penduduk miskin di suatu daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan. Oleh sebab itu pembangunan dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin akan semakin sedikit. Untuk itu pemerintah dengan berbagai program berupaya menanggulangi kemiskinan, namun disadari bahwa pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil maksimal dan belum sesuai dengan harapan. Kompleksnya masalah kemiskinan disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi terciptanya kemiskinan.

Masih besarnya angka kemiskinan di Kota Medan memacu peringkat pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dalam mensejahterakan masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di setiap daerah. Salah satu faktor penyebab angka kemiskinan dikarenakan terjadinya inflasi rupiah, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Selain itu pengangguran juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat pada lingkungan kita. Semakin naiknya jumlah pengangguran akan semakin banyak masyarakat yang tidak bekerja dan sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan juga dapat dilihat dari kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas

kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan.

Kemiskinan sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah suatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari karena mereka merasakan hidup dalam kemiskinan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat pengangguran tenaga kerja penuh (*fullemployment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat berpendapatan tetap akan tergerus daya belinya, sehingga bagi masyarakat miskin akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Dari uraian di atas serta pemikiran di atas, maka penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti tentang **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Penduduk Di Kota Medan"**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin.
2. Adanya pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin
3. Adanya pengaruh pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin.

1.3 Batasan Masalah

Untuk melihat faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin yaitu, jumlah pengangguran (X_1) dan inflasi (X_2) terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Medan. Ini dianggap penulis sebagai tiga faktor yang sangat penting untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Medan. Data yang diambil dibatasi pada tahun 2012 – tahun 2018 dan untuk menganalisa data penulis menggunakan metode regresi linear berganda.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kota Medan pada tahun 2012 – tahun 2018. Penulis akan mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kota Medan?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kota Medan?
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran dan Inflasi secara bersama – sama terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kota Medan

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Medan.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran dan Inflasi secara bersama – sama terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan tentang pengentasan kemiskinan di Kota Medan.
2. Bagi penulis, sebagai sumber pengetahuan tentang kemiskinan dan landasan wawasan dalam penulisan skripsi.
3. Sebagai bahan masukan atau referensi dalam membuat karya ilmiah berikutnya bagi para peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi mahasiswa / mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara khususnya jurusan Ekonomi Pembangunan.